

KONSTRUKSI KEWAJIBAN DAN UTANG MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM MELALUI SYSTEMATIC INTEGRATIVE REVIEW DAN SEMIOTIKA PEIRCE

Uswatun Hasanah, Ahmad Yudhira, Oki Prayogi

Universitas Tjut Nyak Dhien

Jalan Gatot Subroto / Gg. Rasmi No. 28, Sei Sikambing C. II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara

Email: uswatun.hasanah@utnd.ac.id*, ahmadyudhira@utnd.ac.id, okiparyogi@utnd.ac.id

ABSTRACT

This study aims to show how the literature constructs mahr as a right, obligation, value, payment, deferral, and debt in Islamic marriage, and to interpret the signs and practices representing these obligations through Peircean semiotics from a socio-cultural accounting perspective. The data were drawn from Scopus-indexed literature searched on 13 August 2026 using title, abstract, and keyword fields. The final search identified 31 documents, which were screened using eight inclusion and exclusion criteria, resulting in 14 full-text articles that met the eligibility criteria and were included in the final analysis. The study employed a systematic integrative review involving data extraction and integrative synthesis, followed by Peircean semiotic analysis using the sign-object-interpretant relationship. The findings show that mahr is constructed as a woman's economic right tied to the giver's obligation and characterized by specific values and fulfillment mechanisms. Deferral does not automatically constitute debt; unpaid and outstanding represent unresolved obligations, whereas debt is constructed when the literature explicitly employs terms such as debt, binding debt, or creditor-debtor relationships. The semiotic analysis identifies four clusters of meaning: obligation formation, fulfillment and temporality, continuity of obligation, and representation and settlement. From a socio-cultural accounting perspective, these findings demonstrate that economic obligations may acquire meaning and binding force through social relations, religious norms, and the institution of marriage. This study proposes understanding mahr debt as a value-bearing relational obligation, rather than merely as a formal financial liability.

Keywords: deferred mahr; economic obligation; mahr debt; Peircean semiotics; socio-cultural accounting.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana literatur mengonstruksi mahar sebagai hak, kewajiban, nilai, pembayaran, penangguhan, dan utang dalam perkawinan Islam serta menafsirkan tanda dan praktik yang merepresentasikan kewajiban tersebut melalui semiotika Peirce dalam perspektif *socio-cultural accounting*. Data penelitian berasal dari literatur terindeks Scopus yang ditelusuri pada 13 Agustus 2026 melalui *title*, *abstract*, dan *keywords*. Pencarian final menghasilkan 31 dokumen yang diseleksi berdasarkan delapan kriteria inklusi dan eksklusi hingga diperoleh 14 artikel *full text* yang memenuhi kriteria kelayakan dan dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini

menggunakan *systematic integrative review* melalui ekstraksi dan sintesis integratif, dilanjutkan dengan analisis semiotika Peirce menggunakan relasi *sign-object-interpretant*. Hasil menunjukkan bahwa mahar dikonstruksi sebagai hak ekonomi perempuan yang berhubungan dengan kewajiban pihak pemberi serta memiliki nilai dan mekanisme pemenuhan tertentu. Penangguhan tidak secara otomatis menunjukkan utang; *unpaid* dan *outstanding* merepresentasikan kewajiban yang belum terselesaikan, sedangkan konstruksi utang ditemukan ketika literatur secara eksplisit menggunakan terminologi *debt*, *binding debt*, atau relasi *creditor-debtor*. Analisis semiotika menunjukkan empat garis besar makna, yaitu pembentukan kewajiban, pemenuhan dan waktu, keberlanjutan kewajiban, serta representasi dan penyelesaian. Dalam perspektif *socio-cultural accounting*, temuan menunjukkan bahwa kewajiban ekonomi dapat memperoleh makna dan daya ikat melalui relasi sosial, norma agama, dan institusi perkawinan. Penelitian ini mengusulkan utang mahar sebagai kewajiban relasional bernilai (*value-bearing relational obligation*), bukan sebagai liabilitas finansial formal.

Kata kunci: utang mahar; kewajiban ekonomi; semiotika Peirce; *socio-cultural accounting*; *systematic integrative review*.

1. PENDAHULUAN

Mahar merupakan bagian dari perkawinan Islam yang memiliki dimensi ekonomi karena berkaitan dengan hak perempuan atas sesuatu yang bernilai dan kewajiban laki-laki untuk memenuhinya (Jahangir & Bulut, 2025). Mahar dapat berfungsi sebagai bentuk keamanan ekonomi bagi perempuan karena memberikan hak atas aset yang diterima dalam perkawinan (Azahari & Ali, 2015). Mahar juga dipahami sebagai pembayaran atau komitmen pembayaran dari laki-laki kepada perempuan yang melekat pada hubungan perkawinan (Showkat, 2023). Dalam perkembangannya, mahar bahkan dipandang memiliki potensi untuk mendukung pemberdayaan finansial perempuan apabila mekanisme pemenuhannya dirancang lebih efektif. Mahar tidak hanya memiliki makna religius dalam perkawinan, tetapi juga mengandung konsekuensi ekonomi karena melibatkan hak, kewajiban, nilai, dan pemenuhan (Jahangir & Bulut, 2025).

Persoalan ekonomi mahar menjadi lebih kompleks ketika kewajiban tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi pada saat perkawinan. Hak finansial perempuan atas *dower* tetap menjadi persoalan ketika perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian suami (Munir, 2022). Keberadaan mahar juga sebagai instrumen keamanan ekonomi tidak selalu berjalan efektif karena pengakuan hukum, mekanisme penegakan, dan praktik sosial dapat memengaruhi kemampuan perempuan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang diharapkan dari mahar (Azahari & Ali, 2015). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan mahar tidak berhenti pada penetapan jumlah atau bentuk pemberian, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan kewajiban, waktu pemenuhan, serta hubungan antara pihak yang memiliki hak dan pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.

Keberlanjutan kewajiban untuk memenuhi mahar, terutama ketika pembayarannya ditangguhkan atau belum diselesaikan, membuka ruang untuk dikaji dari perspektif *accounting* yang lebih luas. *Accounting* tidak hanya dapat

dipahami sebagai prosedur teknis untuk mencatat transaksi dan menghasilkan laporan keuangan, tetapi juga sebagai praktik yang terbentuk dalam lingkungan sosial dan institusional tertentu (Potter, 2005). Ruang kajian *accounting* juga dapat ditemukan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan konteks budaya yang membentuk cara individu maupun kelompok memahami dan menjalankan praktik ekonomi (Jeacle, 2009). Pendekatan interpretatif dalam *accounting* selanjutnya memberi perhatian pada bagaimana praktik *accounting* memperoleh makna melalui konteks sosial tempat praktik tersebut berlangsung (Lukka & Modell, 2017). Perspektif ini memungkinkan hak, kewajiban, nilai, waktu pemenuhan, dan pertanggungjawaban ekonomi dipahami tidak hanya melalui sistem *accounting* formal, tetapi juga melalui relasi sosial yang membentuk keberadaan dan makna tersebut (Potter, 2005).

Pendekatan sosial relevan untuk memahami kewajiban ekonomi yang lahir dari institusi keagamaan karena agama dapat membentuk praktik ekonomi, akuntansi, dan pertanggungjawaban (Cordery, 2015; Herda et al., 2013). Pemaknaan tersebut sejalan dengan konsep amanah yang menempatkan tanggung jawab dalam hubungan antara pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah yang harus dipenuhi (Mauludimah et al., 2023). Dalam lingkungan Islam, *accountability* tidak hanya dibentuk oleh mekanisme administratif formal, tetapi juga oleh nilai-nilai religius yang memaknai tanggung jawab (Basri & Siti-Nabiha, 2016). Utang pun tidak sekadar berupa kewajiban finansial, melainkan juga bagian dari hubungan sosial yang mengandung interdependensi, kepercayaan, dan kewajiban moral (Guérin & Venkatasubramanian, 2022; Smith, 2024). Perspektif ini menjadi dasar untuk memahami kewajiban mahar sebagai fenomena ekonomi yang berkaitan erat dengan agama, hubungan sosial, dan norma perkawinan.

Kewajiban memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang memerlukan representasi dan pemaknaan. Dalam penelitian interpretif, *accounting* tidak hanya merekam realitas, tetapi juga merepresentasikannya melalui *inscription* sehingga persoalan ekonomi dan sosial dapat dikenali dan dimaknai (Busco & Quattrone, 2018). Semiotika Peirce menjelaskan proses tersebut melalui *semiosis*, yaitu relasi triadik antara *sign*, *object*, dan *interpretant*. Interpretan dapat menjadi tanda baru sehingga makna terus berkembang melalui proses interpretasi (Peirce, 1931, 1977, 1992, 1998). Kerangka ini juga digunakan untuk memahami makna tanda dalam relasi sosial (Zhang & Sheng, 2017). Dalam penelitian ini, semiotika Peirce digunakan untuk membaca representasi kewajiban sebelum ditafsirkan melalui perspektif *socio-cultural accounting*.

Kajian *accounting* memaknai mahar sebagai harta, kewajiban atau utang bagi laki-laki, serta modal dan pendapatan bagi perempuan. Mahar juga dapat menjadi beban bagi laki-laki atau perempuan ketika sebagian mahar harus dikembalikan akibat perceraian yang diajukan (Rahman et al., 2019). Pemaknaan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh fikih, budaya, dan tradisi (Rahman et al., 2019). Kajian berikutnya secara lebih spesifik menghubungkan mahar dengan kewajiban pembayaran dengan mengklasifikasikan mahar yang dibayarkan kurang dari satu tahun sebagai utang lancar dan pembayaran yang lebih dari satu tahun sebagai utang jangka panjang (Shoimah et al., 2022). Sementara itu, kajian berbasis budaya

menunjukkan bahwa penetapan nilai mahar *boka* dalam perkawinan adat Buton tidak hanya berkaitan dengan nominal uang, tetapi juga turut dibentuk oleh status sosial tradisional serta nilai penghormatan, penghargaan, kesiapan, tanggung jawab, izin, dan restu (Rachmadani, 2023). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa mahar telah memperoleh tempat dalam penelitian *accounting*, baik sebagai kategori ekonomi dan kewajiban maupun sebagai praktik yang memperoleh makna dari agama dan budaya.

Penelitian terdahulu masih menyisakan ruang konseptual yang belum dijelaskan. Pembacaan mahar dalam akuntansi syariah sebelumnya dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur *accounting* dan PSAK 101 sebagai perangkat analisis untuk memperoleh konsep *accounting* dalam budaya mahar (Rahman et al., 2019). Pendekatan lain juga secara langsung menempatkan mahar ke dalam kategori aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban, serta utang berdasarkan jangka waktu pembayarannya (Shoimah et al., 2022). Di sisi lain, penelitian berbasis budaya lebih diarahkan pada proses penetapan dan pemaknaan nilai mahar dalam konteks komunitas tertentu (Rachmadani, 2023). Kajian-kajian tersebut telah memberikan penjelasan penting mengenai bagaimana mahar dapat dibaca melalui kategori *accounting* maupun nilai budaya. Namun, belum ter jelaskan secara sistematis bagaimana literatur lintas disiplin terlebih dahulu mengonstruksi mahar sebagai hak, kewajiban, nilai, pembayaran, penangguhan, dan utang, serta bagaimana konstruksi tersebut memperoleh makna sebelum diinterpretasikan melalui perspektif *accounting*. Kesenjangan ini menjadi penting karena memungkinkan mahar dipahami dari realitas dan konstruksi yang melekat padanya terlebih dahulu, bukan langsung ditempatkan ke dalam kategori *accounting* yang telah ditentukan sebelumnya.

Kebaruan penelitian terletak pada integrasi konstruksi kewajiban mahar lintas disiplin, analisis *sign-object-interpretant* Peirce, dan interpretasi *socio-cultural accounting* dalam satu rangkaian. Pendekatan ini menggeser fokus dari pemberian kategori *accounting* pada mahar menuju pemahaman tentang bagaimana kewajiban bernilai dikonstruksi dalam relasi sosial, religius, hukum, dan budaya sebelum ditafsirkan melalui perspektif *accounting*.

Kesenjangan konseptual tersebut menjadi dasar penggunaan *systematic integrative review* dalam penelitian ini. Pendekatan integratif memungkinkan penelitian dengan latar disiplin dan desain yang berbeda disintesis untuk menghasilkan pemahaman konseptual yang lebih luas tentang fenomena yang kompleks (Dwertmann & van Knippenberg, 2021; Elsbach & van Knippenberg, 2020; Torraco, 2016). Dalam penelitian ini, integrasi literatur digunakan untuk memahami bagaimana mahar dikonstruksi dalam berbagai konteks, kemudian semiotika Peirce digunakan untuk membaca representasi dan maknanya sebelum diinterpretasikan melalui perspektif *socio-cultural accounting*. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan: RQ1. Bagaimana literatur mengonstruksi mahar sebagai hak, kewajiban, nilai, pembayaran, penangguhan, dan utang dalam perkawinan Islam? RQ2. Bagaimana tanda dan praktik yang merepresentasikan kewajiban mahar tersebut dimaknai melalui semiotika Peirce dan diinterpretasikan dalam perspektif *socio-cultural accounting*?

2. LANDASAN TEORI

2.1. KEWAJIBAN EKONOMI SEBAGAI RELASI SOSIAL

Kajian ini menggunakan teori keterlekatan (*embeddedness theory*) sebagai landasan untuk memahami kewajiban ekonomi dalam relasi sosial. Teori ini memandang tindakan ekonomi tidak berlangsung secara terpisah, melainkan melekat dalam jaringan hubungan sosial dan institusi yang membentuk tindakan para pihak (Granovetter, 1985). Pada pembahasan mahar, kewajiban ekonomi tidak lahir dari transaksi komersial atau hubungan kredit formal, melainkan dari akad perkawinan yang menempatkan perempuan sebagai pemegang hak dan laki-laki sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya. Makna dan daya ikat kewajiban tersebut dibentuk oleh norma agama, relasi sosial, dan institusi perkawinan. Oleh karena itu, utang tidak hanya berkaitan dengan jumlah yang harus dibayar, tetapi juga dengan hubungan dan ketergantungan antara pihak-pihak yang terlibat (Guérin & Venkatasubramanian, 2022). Keberadaan kewajiban juga dapat bertahan melampaui pertukaran ekonomi sesaat karena di dalamnya melekat unsur kepercayaan dan tanggung jawab sosial (Smith, 2024).

2.2. SEMIOTIKA PEIRCE SEBAGAI KERANGKA PEMAKNAAN

Makna terbentuk melalui relasi triadik antara *sign* sebagai representasi, objek sebagai sesuatu yang dirujuk, dan *interpretant* sebagai hasil pemaknaan dalam semiotika Peirce. Interpretan dapat menjadi tanda baru sehingga membentuk proses *semiosis* yang berkelanjutan (Peirce, 1931, 1977, 1992, 1998). Pemaknaan tersebut selalu berkaitan dengan konteks sosial tempat representasi tersebut dipahami (Zhang & Sheng, 2017). Dalam penelitian ini, istilah, dokumen, atau praktik diposisikan sebagai *sign*; realitas yang dirujuk sebagai *object*; dan makna yang terbentuk sebagai *interpretant*. Kerangka ini digunakan untuk menelusuri pembentukan makna mahar sebelum menafsirkannya melalui perspektif *socio-cultural accounting*.

2.3. SOCIO-CULTURAL ACCOUNTING SEBAGAI PERSPEKTIF INTERPRETASI

Accounting dapat dipahami sebagai praktik yang tidak terlepas dari lingkungan sosial dan institusional tempat praktik tersebut berlangsung (Potter, 2005). Perspektif ini membuka kemungkinan untuk memahami *accounting* di luar ruang organisasi formal dan melihatnya dalam praktik kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh kebiasaan budaya masyarakat (Potter, 2005). Dalam penelitian interpretif, perhatian tidak hanya diarahkan pada keberadaan angka atau pencatatan, tetapi juga pada cara realitas ekonomi dibentuk dan dimaknai oleh pihak-pihak yang terlibat (Lukka & Modell, 2017). Perspektif *socio-cultural accounting* digunakan setelah analisis semiotik untuk memaknai hak, kewajiban, nilai, waktu, dan penyelesaian dalam konteks sosial, budaya, agama, dan perkawinan, bukan untuk mengategorikan mahar sebagai *accounting* formal.

3. METODE RISET

3.1. DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *systematic integrative review* (SIR) untuk mengintegrasikan literatur mahar dari berbagai disiplin, konteks, dan pendekatan (Snyder, 2019; Torraco, 2016). Analisis dilakukan melalui sintesis konstruksi mahar sebagai hak, kewajiban, nilai, pembayaran, penangguhan, dan utang, kemudian dianalisis menggunakan semiotika Peirce melalui relasi *sign-object-interpretant*, dan ditafsirkan dalam perspektif *socio-cultural accounting*.

Strategi Penelusuran Literatur

Penelusuran dilakukan melalui Scopus pada 13 Agustus 2026 menggunakan TITLE-ABS-KEY. Pencarian awal dengan istilah (*mahr OR mahar OR "Islamic dower"*) AND (*Islam* OR Muslim* OR marriage OR marital*) menghasilkan 106 dokumen. Pencarian kemudian dipertajam dengan istilah *defer* OR unpaid OR debt OR obligation* OR liabilit* OR payment** dan menghasilkan 31 dokumen untuk proses seleksi. Pembatasan tahun tidak diterapkan agar perkembangan konstruksi mahar lintas periode dapat tercakup.

3.2. KRITERIA INKLUSI DAN EKSKLUSI

Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memilih literatur yang memuat informasi substantif dan relevan dengan pertanyaan penelitian. Kriteria tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Aspek	Inklusi	Eksklusi
Jenis dokumen dan akses	<i>Article, review, dan full conference paper</i> yang menyediakan informasi substantif serta dapat dipahami dan diakses untuk ekstraksi data, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa lain.	<i>Editorial, book review, note, erratum</i> , abstrak konferensi tanpa <i>full text</i> , serta dokumen yang tidak dapat dipahami, diakses, atau tidak menyediakan informasi memadai.
Objek dan konteks	Membahas <i>mahr/mahar/dower</i> sebagai mahar dalam perkawinan Islam/Muslim.	Membahas <i>dowry, bride price, bridewealth</i> , uang adat, atau pembayaran perkawinan lain yang bukan <i>mahr</i> , serta penggunaan istilah <i>mahr/mahar</i> di luar konteks perkawinan Islam, kecuali <i>mahr</i> dibahas secara substantif.

Aspek	Inklusi	Eksklusi
Relevansi substantif dan analitis	Membahas mahar sebagai hak dan/atau kewajiban bernilai ekonomi serta menyediakan informasi yang dapat diekstraksi mengenai makna, nilai, pihak yang berhak atau berkewajiban, pembayaran, waktu pembayaran, penangguhan, utang, pemenuhan, penyelesaian, <i>enforcement</i> , atau perubahan nilai.	Mahar hanya disebut sebagai ritual, simbol, atau latar belakang tanpa pembahasan substantif, atau informasi yang tersedia tidak memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian dan melakukan sintesis.
Duplikasi	Versi publikasi yang paling lengkap dan relevan dipertahankan.	Publikasi duplikat atau versi lain dengan substansi penelitian yang sama dikeluarkan.

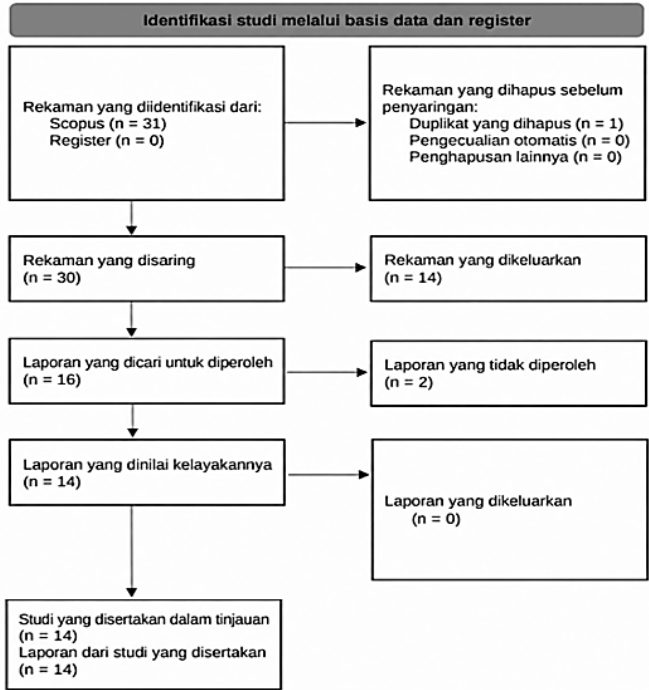
Sumber: Penulis (2026)

Istilah *debt* tidak digunakan sebagai syarat inklusi agar mahar yang ditanggihkan tidak sejak awal diposisikan sebagai utang. Artikel tetap dipertimbangkan apabila memuat informasi substantif mengenai hak finansial, kewajiban, nilai, pembayaran, penangguhan, atau penyelesaian mahar.

Seleksi Artikel

Pencarian menghasilkan 31 dokumen. Setelah satu duplikat dihapus, 30 dokumen menjalani *screening* berdasarkan judul, abstrak, jenis dokumen, objek, konteks perkawinan, serta relevansi ekonomi dan kewajiban mahar. Sebanyak 14 dokumen dikeluarkan: enam tidak membahas mahar secara substantif, empat berfokus pada pembayaran perkawinan selain *mahr*, dan empat berupa *book chapter*. Dari 16 artikel yang ditelusuri, 2 teks lengkap tidak dapat diperoleh. Dengan demikian, 14 artikel memenuhi kriteria kelayakan dan dimasukkan ke dalam analisis akhir. Proses seleksi disajikan dalam diagram alir PRISMA 2020.

Gambar 1. Diagram Alir Identifikasi dan Seleksi Artikel



Sumber: Diadaptasi dari PRISMA 2020 (Page et al., 2021)

Nomor dokumen dari 31 artikel hasil pencarian dipertahankan sebagai kode artikel hingga tahap analisis dan tidak dinomori ulang setelah dilakukan eksklusi. Rincian keputusan seleksi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Keputusan Seleksi dan Kode Dokumen

Kode	Judul ringkas	Keputusan akhir	Dasar Keputusan
1	<i>A Set of Prayer Outfits as a Mahar?</i>	Included	Mahar Islam menjadi objek substantif dan membahas nilai ekonomi, hak perempuan, serta penggunaan mahar.
3	<i>Sompa and Doi Menre in Bugis Bone Marriage...</i>	Included	<i>Sompa</i> dibahas sebagai mahr dan kewajiban religius, termasuk implementasi dan penyelesaiannya.
4	<i>Financial Rights of Woman...</i>	Included	Membahas mahr sebagai hak finansial, pembayaran tertunda, jatuh tempo, dan penyelesaian dalam perceraian atau kematian.

Kode	Judul ringkas	Keputusan akhir	Dasar Keputusan
7	<i>Flirting with God in Western Secular Courts: Mahr in the West</i>	Included	Mahr menjadi objek utama dan dibahas sebagai kewajiban kontraktual serta dalam konteks adjudikasi.
9	<i>Comparing Dowry System and Mahr...</i>	Included	Secara substantif membedakan mahr dari <i>dowry/bride price</i> dan membahas kewajiban pemberiannya.
11	<i>Integrating Religious and Customary Financial Obligations...</i>	Included	Mahar diposisikan sebagai kewajiban finansial religius dan dibandingkan dengan kewajiban finansial adat.
12	<i>Indexation of Mahr (Dower)... Iran</i>	Included	Membahas relasi <i>creditor-debtor</i> , pembayaran, nilai nominal, inflasi, dan daya beli mahr.
13	<i>Position and Number of Dowries in Muslim Countries</i>	Included	Membahas kewajiban suami, jumlah atau nilai mahr, dan regulasinya.
17	<i>Enforceability of Mahr under a Shari'a Law-Based Contract...</i>	Included	Fokus pada keberlakuan kewajiban mahr, pembayaran, serta kondisi perceraian dan kematian.
19	<i>Marriages among the Tobol-Irtysh Tatars...</i>	Included	Pemeriksaan teks lengkap menunjukkan pembahasan substantif mengenai mahr dan hak properti perempuan.
20	<i>Explaining Marriage Payments: Mahr among Omanis</i>	Included	Mahr menjadi objek utama dan dianalisis dari sisi jumlah, pembayaran, beban ekonomi, dan faktor penentu nilai.
22	<i>Rejuvenating the Practice of Mahr for Muslim Women's Financial Empowerment...</i>	Included	Membahas mahr sebagai hak finansial, kemampuan pembayaran, nilai, dan mekanisme pembiayaan.
28	<i>Delayed Mahar: The Perspective of Islamic and Customary Law</i>	Included	<i>Full conference paper</i> yang secara langsung membahas penundaan, pembayaran sebagian, dan mahr sebagai utang.

Kode	Judul ringkas	Keputusan akhir	Dasar Keputusan
30	Matrimonial Gifts in Early Islamic Egypt	Included	Mahr/sadaq menjadi objek substantif dan dibahas dalam bentuk pembayaran di muka dan pembayaran tertunda.

Sumber: Penulis (2026)

Dari tabel 2, artikel yang diterima yaitu dokumen No. 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 28, dan 30 yang selanjutnya akan digunakan untuk sintesis analisis.

3.3. EKSTRAKSI DAN SINTESIS DATA

Ekstraksi terhadap 14 artikel mempertahankan terminologi asli agar konsep tidak langsung dialihkan ke istilah *accounting*. Data yang dikumpulkan mencakup karakteristik studi, hak dan kewajiban, bentuk dan nilai mahar, pembayaran, penangguhan, kewajiban yang belum dipenuhi, utang, dokumentasi, penyelesaian klaim, serta perubahan nilai. Setiap data dilengkapi dengan bukti tekstual agar dapat ditelusuri ke sumbernya.

Sintesis RQ1 membandingkan kesamaan, perbedaan, dan hubungan konseptual antardokumen. Istilah serupa dikelompokkan dengan tetap membedakan *deferred/delayed*, *unpaid/outstanding/owed*, dan *debt*. Kategori utang hanya digunakan apabila sumber menyebutkannya atau secara substantif mengonstruksikannya sebagai utang.

3.4. ANALISIS SEMIOTIKA PEIRCE

Analisis semiotika dilakukan setelah konstruksi RQ1 terbentuk. Urutan ini memungkinkan tanda yang dianalisis benar-benar berasal dari artikel terpilih dan tidak ditentukan terlebih dahulu berdasarkan perspektif peneliti. Relasi triadik Peirce digunakan untuk membaca hubungan antara *sign*, *object*, dan *interpretant*. *Sign* merujuk pada representasi yang ditemukan dalam literatur, sedangkan *object* merujuk pada kondisi atau relasi yang direpresentasikan oleh tanda tersebut. *Interpretant* merupakan makna yang terbentuk dari hubungan keduanya dalam konteks artikel terpilih.

Pembacaan semiotik kemudian diinterpretasikan melalui perspektif *socio-cultural accounting*. Pada tahap ini, perhatian tidak diarahkan untuk mencari kesesuaian mahar dengan kategori *accounting* formal, tetapi untuk memahami bagaimana hak, kewajiban, nilai, waktu, dokumentasi, dan penyelesaian memperoleh makna di dalam relasi sosial, norma agama, praktik budaya, serta institusi perkawinan. Dengan demikian, posisi *accounting* dalam penelitian ini bersifat interpretatif, yaitu sebagai perspektif untuk memahami pembentukan dan keberlangsungan kewajiban ekonomi dalam kehidupan sosial.

3.5. KETELITIAN DAN KETELUSURAN ANALISIS

Ketelitian analisis dijaga melalui *analytical traceability* yang menghubungkan sumber, bukti tekstual, kode, kategori, dan interpretasi. Setiap kategori RQ1 dan *sign* dalam RQ2 harus dapat ditelusuri ke artikel terpilih, sedangkan matriks ekstraksi digunakan sebagai *audit trail*.

Bukti sumber dipisahkan dari interpretasi peneliti. Istilah dan pernyataan dalam artikel diperlakukan sebagai bukti, sedangkan pengategorian, pembentukan *interpretant*, dan pembacaan melalui *socio-cultural accounting* merupakan interpretasi dalam penelitian ini. Strategi ini meningkatkan transparansi dan mengurangi pemaksaan konsep *accounting* terhadap sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. KARAKTERISTIK PENELITIAN

Sebanyak 14 artikel memenuhi kriteria kelayakan, yaitu artikel No. 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 28, dan 30. Nomor artikel mengikuti kode sejak tahap *screening*. Identitas artikel yang beragam dari segi tahun, disiplin, konteks geografis, dan orientasi pembahasan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Artikel dalam Artikel terpilih Akhir

Kode	Penulis	Tahun	Judul	Sumber publikasi	Sitasi Scopus*
30	Rapoport	2000	<i>Matrimonial Gifts in Early Islamic Egypt</i>	<i>Islamic Law and Society</i>	45
19	Bakieva	2010	<i>Marriages among the Tobol-Irtysh Tatars in the Late 18th–Early 20th Centuries</i>	<i>Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia</i>	0
7	Fournier	2010	<i>Flirting with God in Western Secular Courts: Mahr in the West</i>	<i>International Journal of Law, Policy and the Family</i>	18
13	Barkah	2014	<i>The Position and Number of Dowries in Muslim Countries</i>	<i>Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah</i>	2
12	Ansari-Pour	2017	<i>Indexation of Mahr (Dower): A Precursor of</i>	<i>Arab Law Quarterly</i>	5

Kode	Penulis	Tahun	Judul	Sumber publikasi	Sitasi Scopus*
			<i>the Law of Inflation in Iran</i>		
28	Pandang et al.	2018	<i>Delayed Mahar: The Perspective of Islamic and Customary Law</i>	<i>IOP Conference Series: Earth and Environmental Science</i>	4
20	Safar	2018	<i>Explaining Marriage Payments: Mahr among Omanis</i>	<i>Hawwa</i>	6
1	Yenti et al.	2020	<i>A Set of Prayer Outfits as a Mahar? Discrimination against Women in the 'Urf Reality of the Archipelago's Fiqh</i>	<i>Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan</i>	9
4	Munir	2022	<i>Financial Rights of Woman on the Dissolution of Her Marital Relationship and Death of Her Husband in Islamic Law and Pakistani Legal System</i>	<i>Hamdard Islamicus</i>	2
9	Ekşi dan Uddin	2024	<i>Comparing Dowry System and Mahr: Cultural Practices Versus Ottoman Law in Turkish Matrimonial Traditions</i>	<i>Islamiyyat</i>	0
17	Raman	2024	<i>Enforceability of Mahr under a Sharī'a Law-</i>	<i>International Journal of Law,</i>	1

Kode	Penulis	Tahun	Judul	Sumber publikasi	Sitasi Scopus*
			<i>Based Contract in New Zealand...</i>	<i>Policy and the Family</i>	
3	Asni et al.	2025	<i>Sompa and Doi Menre in Bugis Bone Marriage and Its Settlement in the Religious Court from the Perspective of Maslahah</i>	<i>Samarah</i>	0
22	Jahangir dan Bulut	2025	<i>Rejuvenating the Practice of Mahr for Muslim Women's Financial Empowerment...</i>	<i>Journal of Islamic Accounting and Business Research</i>	5
11	Muzainah et al.	2025	<i>Integrating Religious and Customary Financial Obligations in Banjarese Marriages...</i>	<i>Journal of Islamic Law</i>	7

Sumber: Penulis (2026)

Artikel terpilih terdiri atas 14 publikasi pada periode 2000–2025 dengan sumber dan tradisi keilmuan yang beragam. Jumlah sitasi Scopus hanya digunakan untuk menggambarkan karakteristik artikel, bukan sebagai dasar pembobotan sintesis. Analisis didasarkan pada relevansi substantif terhadap pertanyaan penelitian dan kecukupan bukti pada setiap sumber.

Tabel 4. Distribusi Artikel terpilih Berdasarkan Konteks Geografis

Konteks geografis	Kode artikel	Jumlah
Indonesia	1, 3, 11, 28	4
Pakistan	4	1
Iran	12	1
Oman	20	1
Turki/Ottoman	9	1
Mesir Islam awal	30	1
Komunitas Tatar Siberia	19	1
Beberapa negara Muslim	13	1
Sistem hukum Barat	7, 17	2

Konteks Muslim/lintas wilayah	22	1
Total		14

Sumber: Data penelitian diolah (2026)

Artikel terpilih mencakup beragam konteks geografis dan, dengan Indonesia sebagai konteks terbanyak, diikuti sistem hukum Barat serta beberapa negara dan komunitas Muslim lainnya. Keragaman hukum, budaya, sejarah, dan kelembagaan tersebut memungkinkan konstruksi mahar dianalisis melampaui satu komunitas serta membantu mengidentifikasi kesamaan dan variasi pemaknaan hak, kewajiban, nilai, waktu pembayaran, dan penyelesaiannya

Tabel 5. Karakteristik Pendekatan Studi dalam Artikel terpilih

Pendekatan dominan	Kode artikel	Karakteristik kajian
Hukum/normatif/doctrinal	1, 4, 12, 13	Mengkaji kedudukan, hak, kewajiban, pembayaran, utang, atau nilai mahar berdasarkan ketentuan dan argumentasi hukum.
Hukum komparatif	7, 17	Membahas posisi dan <i>enforcedability</i> mahar dalam lingkungan atau sistem hukum yang berbeda.
Empiris/sosiolegal	3, 28	Mengkaji praktik mahar dalam masyarakat serta penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaannya.
Historis/hukum-historis	9, 19, 30	Menggunakan praktik, sumber, atau dokumen historis untuk menjelaskan bentuk, hak, dan kewajiban yang berkaitan dengan mahar.
Empiris berbasis wawancara/survey	20	Mengkaji praktik pembayaran, nilai, negosiasi, dan bentuk pemenuhan mahar dalam masyarakat.
Normatif-historis/kepuustakaan	11	Membahas hubungan kewajiban finansial agama dan adat dalam praktik perkawinan.
Pengembangan pendekatan keuangan	22	Menempatkan mahar dalam persoalan hak finansial, nilai, kemampuan pembayaran, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Sumber: Data penelitian diolah (2026)

Artikel terpilih menggunakan pendekatan hukum normatif, komparatif, empiris, historis, sosiolegal, dan keuangan. Keragaman tersebut memperlihatkan mahar sebagai ketentuan normatif sekaligus praktik yang dinegosiasikan, dibayarkan, ditanggihkan, didokumentasikan, dan diselesaikan. Sesuai dengan desain *systematic integrative review*, sintesis tidak didasarkan pada keseragaman metode, melainkan pada representasi substantif mengenai hak, kewajiban, nilai, pembayaran, penanggihan, dan penyelesaian mahar.

4.2. KONSTRUKSI MAHAR SEBAGAI HAK, KEWAJIBAN, NILAI, PEMBAYARAN, PENANGGUHAN, DAN UTANG

Sintesis 14 artikel menunjukkan bahwa mahar dikonstruksi melalui dimensi hak, kewajiban, nilai, pembayaran, penanggihan, kewajiban yang belum diselesaikan, utang, penyelesaian atau penegakan, dan perubahan nilai. Hubungan antardimensi tidak selalu linier karena dipengaruhi oleh konteks hukum, sosial, budaya, dan historis. Perbedaan utama terletak pada penanggihan, kewajiban yang belum diselesaikan, dan utang, karena mahar yang ditanggihkan tidak selalu dikonstruksi sebagai utang.

Tabel 6. Sintesis Konstruksi Mahar dalam Artikel Terpilih

Konstruksi	Representasi yang ditemukan	Sintesis temuan	Basis artikel
Hak	<i>Financial right, exclusive right, right of wife, proprietary right</i>	Mahar dikonstruksi sebagai hak perempuan yang melekat dalam hubungan perkawinan.	1, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 28, 30
Kewajiban	<i>Religious obligation, legal obligation, contractual obligation, obliged to pay</i>	Hak atas mahar berkorespondensi dengan kewajiban pihak pemberi untuk menyerahkan atau memenuhi mahar.	1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 28, 30
Nilai	<i>Monetary value, material value, amount, property, gold</i>	Mahar direpresentasikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai atau jumlah yang dapat ditentukan, disepakati, atau dinegosiasikan.	1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 28, 30
Pembayaran	<i>Prompt, advance, partial payment, installment, paid/delivered</i>	Pemenuhan mahar dapat dilakukan secara langsung, di muka, sebagian, bertahap, ataupun pada waktu berikutnya.	1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 28, 30

Konstruksi	Representasi yang ditemukan	Sintesis temuan	Basis artikel
Penangguhan	<i>Deferred mahr/dower/sadaq, delayed mahar</i>	Penangguhan menggeser waktu pemenuhan ke masa mendatang tanpa secara otomatis menghilangkan hak penerima dan kewajiban pemberi.	1, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 28, 30
Kewajiban belum terselesaikan	<i>Unpaid, outstanding, owed</i>	Sebagian artikel menunjukkan adanya mahar yang masih belum dipenuhi setelah kewajiban terbentuk atau jatuh tempo.	4, 17, 19, 30
Utang	<i>Debt, binding debt, monetary debt, creditor-debtor, mahar terutang</i>	Pada sebagian artikel, kewajiban mahar yang belum dipenuhi dikonstruksi secara eksplisit sebagai utang.	11, 12, 13, 28, 30
Penyelesaian/penegakan	<i>Settlement, enforcement, claim, court order, payable</i>	Hak yang belum terpenuhi dapat menjadi objek klaim atau penyelesaian melalui mekanisme sosial maupun hukum.	3, 4, 7, 12, 13, 17, 19, 30
Perubahan nilai	<i>Inflation, indexation, purchasing power</i>	Jarak waktu antara penetapan dan pembayaran dapat menimbulkan persoalan perubahan nilai mahar.	12

Sumber: Hasil sintesis artikel terpilih (2026)

Konstruksi yang paling konsisten adalah hubungan antara hak perempuan (*financial, exclusive, wife*, dan *proprietary right*) dan kewajiban pemberi mahar (*religious, legal*, dan *contractual obligation* serta *obliged to pay*). Hubungan tersebut mencakup bentuk dan nilai mahar—seperti uang, emas, properti, barang, dan jasa—serta mekanisme pemenuhannya secara langsung, di muka, sebagian, bertahap, atau pada waktu yang disepakati.

Dimensi waktu ditemukan dalam 13 dari 14 artikel melalui istilah *deferred mahr*, *deferred dower*, *deferred sadaq*, dan *delayed mahar*. Hal ini menunjukkan bahwa mahar tidak selalu diselesaikan saat akad dan dapat menjadi *payable* setelah kondisi tertentu terpenuhi. Namun, penangguhan berbeda dari kewajiban yang belum diselesaikan. *Deferred* atau *delayed* menunjukkan pengaturan waktu pembayaran, sedangkan *unpaid*, *outstanding*, dan *owed* menunjukkan kewajiban yang belum dipenuhi. Artikel No. 17, misalnya, menunjukkan bahwa *deferred mahr* menjadi utang setelah perceraian.

Konstruksi utang ditemukan secara terbatas dalam lima artikel melalui istilah *debt*, *binding debt*, *monetary debt*, dan *creditor-debtor*. Artikel No. 11 menyebut mahar yang belum dipenuhi sebagai *binding debt upon the husband*, sedangkan Artikel No. 12 menempatkan *money-dower* dalam relasi *creditor-debtor*. Artikel No. 13 dan 28 juga menggambarkan mahar yang belum diselesaikan sebagai utang.

Penyelesaian atau penegakan kewajiban ditemukan dalam delapan artikel melalui klaim, penyelesaian sengketa, proses pengadilan, dan perubahan kewajiban menjadi *payable*. Artikel No. 12 juga membahas perubahan nilai mahar akibat inflasi dan penggunaan indeksasi untuk menyesuaikan nilai pembayaran.

4.3. PEMBACAAN SEMIOTIKA PEIRCE ATAS KEWAJIBAN MAHAR

Analisis semiotik mengidentifikasi empat kelompok makna kewajiban mahar, yaitu pembentukan kewajiban, pemenuhan dan waktu, keberlanjutan kewajiban, serta representasi dan penyelesaian. Kelompok tersebut tidak selalu bersifat berurutan, tetapi mencerminkan pola makna dalam artikel yang dipilih.

Tabel 7. Matriks Semiotika Peirce atas Kewajiban Mahar

Kelompok makna	Tanda dalam artikel terpilih	Object	Interpretant	Basis artikel
Pembentukan kewajiban	<i>Financial/ exclusive/proprietary right</i>	Hak perempuan atas mahar	Mahar merepresentasikan hak yang melekat pada pihak penerima	4, 11, 17, 22
Pembentukan kewajiban	<i>Religious/legal/contractual obligation</i>	Kewajiban pemberi mahar	Mahar merepresentasikan tanggung jawab yang mengikat pihak pemberi	11, 17, 22
Pembentukan kewajiban	<i>Monetary/material value</i>	Nilai mahar	Kewajiban mempunyai objek atau nilai yang dapat ditentukan	12, 17
Pemenuhan dan waktu	<i>Prompt/advance/partial payment/installment</i>	Pemenuhan kewajiban	Pembayaran merepresentasikan realisasi sebagian atau seluruh kewajiban	4, 12, 17, 30

Kelompok makna	Tanda dalam artikel terpilih	Object	Interpretant	Basis artikel
Pemenuhan dan waktu	<i>Deferred/delayed mahr</i>	Penundaan waktu pemenuhan	Waktu pemenuhan berpindah ke masa depan sementara kewajiban dapat tetap melekat	11, 17, 22, 30
Pemenuhan dan waktu	<i>Unpaid/outstanding/owed</i>	Bagian kewajiban yang belum dipenuhi	Menandakan adanya pemenuhan kewajiban yang belum selesai	4, 17, 19, 30
Keberlanjutan kewajiban	<i>Debt/binding debt</i>	Kewajiban mahar sebagai utang	Kewajiban yang belum diselesaikan pada konteks tertentu memperoleh status sebagai utang	11, 12, 13, 28, 30
Keberlanjutan kewajiban	<i>Creditor-debtor</i>	Relasi pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban	Utang menempatkan para pihak dalam posisi hak dan kewajiban yang berkorespondensi	12
Representasi dan penyelesaian	<i>Written record/marriage contract</i>	Dokumentasi kewajiban	Kewajiban dibuat dapat ditelusuri dan dibuktikan sepanjang waktu	17, 19, 30
Representasi dan penyelesaian	<i>Claim/enforcement/settlement</i>	Pemenuhan dan penyelesaian hak	Hak yang belum terpenuhi dapat tetap diklaim atau ditegakkan	3, 4, 7, 12, 13, 17, 19, 30

Kelompok makna	Tanda dalam artikel terpilih	Object	Interpretant	Basis artikel
			sampai kewajiban diselesaikan	
Representasi dan penyelesaian	Indexation/inflation adjustment	Pemeliharaan nilai mahar	Perubahan waktu dapat menyebabkan nominal awal tidak lagi merepresentasikan daya beli yang sama	12

Sumber: Hasil analisis artikel terpilih (2026)

Pada kelompok pembentukan kewajiban, tanda *financial right*, *exclusive right*, *proprietary right*, *religious obligation*, dan *contractual obligation* merujuk pada hak perempuan atas mahar dan kewajiban pihak pemberi. *Interpretant*-nya menunjukkan bahwa mahar merupakan hak yang melekat pada penerima dan tanggung jawab yang mengikat pemberi. Tanda *monetary value* dan *material value* menunjukkan bahwa kewajiban tersebut memiliki nilai yang dapat ditentukan.

Kelompok pemenuhan dan waktu ditandai dengan *prompt*, *advance*, *partial payment*, *installment*, *deferred*, dan *delayed mahr*. Pembayaran merepresentasikan realisasi kewajiban, sedangkan *deferred* dan *delayed* menunjukkan pemindahan waktu pemenuhan kewajiban. Artikel No. 17 menunjukkan bahwa *deferred dowry* menjadi utang setelah perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan waktu pembayaran tidak menghapus kewajiban. Namun, *unpaid*, *outstanding*, dan *owed* berbeda dari *deferred* karena menunjukkan kewajiban yang belum dipenuhi. Artikel No. 4, misalnya, mencatat bahwa sebagian *dower* telah dibayarkan, sedangkan sisanya masih *outstanding*.

Kelompok keberlanjutan kewajiban ditandai oleh *debt*, *binding debt*, dan *creditor-debtor*. Artikel No. 11 menyebut *binding debt upon the husband*, sedangkan Artikel No. 12 menempatkan *money-dower* dalam relasi *creditor-debtor*. *Interpretant*-nya menunjukkan bahwa kewajiban yang belum diselesaikan dalam konteks tertentu tetap mengikat pihak pemberi dan mempertahankan posisi pihak penerima.

Kelompok representasi dan penyelesaian ditandai oleh *written record*, *marriage contract*, *claim*, *enforcement*, dan *settlement*. Dokumentasi memungkinkan kewajiban dicatat dan ditelusuri. Artikel No. 30 menunjukkan pencatatan pembayaran *advance*, bagian *deferred*, dan penegasan kembali kewajiban tertulis. Sementara itu, *claim*, *enforcement*, dan *settlement* menunjukkan bahwa hak yang belum dipenuhi dapat dituntut atau diselesaikan.

Tanda *indexation* dan *inflation adjustment* pada artikel No. 12 menunjukkan upaya mempertahankan nilai mahar ketika daya beli berubah. *Interpretant*-nya adalah bahwa nominal awal dapat kehilangan kesetaraan nilai ekonomi akibat perubahan waktu. Karena hanya ditemukan secara kuat dalam satu artikel, temuan ini tidak dapat digeneralisasi.

4.4. PEMBAHASAN RQ1: KONSTRUKSI MAHAR SEBAGAI HAK, KEWAJIBAN, NILAI, PEMBAYARAN, PENANGGUHAN, DAN UTANG

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar tidak hanya dipahami sebagai pemberian dalam perkawinan, tetapi juga sebagai relasi hak dan kewajiban yang memiliki nilai serta mekanisme pemenuhan, baik secara langsung maupun secara tertunda. Konstruksi ini ditemukan dalam berbagai konteks hukum, sosial, budaya, dan historis, termasuk hak finansial perempuan, praktik komunitas lokal, *enforceability* dalam sistem hukum Barat, serta dokumentasi historis (Bakieva, 2010; Fournier, 2010; Munir, 2022; Rapoport, 2000). Keragaman konteks tersebut menunjukkan bahwa bentuk praktik mahar dapat berbeda, tetapi relasi hak, kewajiban, nilai, dan pemenuhan tetap menjadi unsur yang menonjol.

4.4.1. Mahar sebagai Relasi Hak dan Kewajiban Ekonomi

Konstruksi hak merupakan salah satu pola yang paling konsisten dalam artikel terpilih. Mahar ditempatkan sebagai hak perempuan atas sesuatu yang bernilai, sedangkan pihak pemberi muncul dengan kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Posisi ini terlihat, misalnya, dalam pembahasan mengenai hak finansial perempuan dalam hukum Islam dan sistem hukum Pakistan, mahar sebagai hak finansial perempuan, serta hak *proprietary* dan *contractuals* dalam perkara penegakan mahr (Jahangir & Bulut, 2025; Munir, 2022; Raman, 2024). Dalam konteks masyarakat Banjar, hak tersebut juga berkaitan dengan kewajiban agama yang menempatkan istri sebagai pihak yang berhak menerima mahar (Muzainah et al., 2025). Konstruksi mahar dapat diartikan tidak semata-mata berpusat pada objek yang diberikan, melainkan pada hubungan antara pihak yang mengajukan klaim dan pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.

Relasi tersebut juga terlihat dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Studi mengenai praktik *sompa* menunjukkan bahwa mahar memiliki konsekuensi kewajiban yang dapat berlanjut hingga penyelesaian sengketa, sedangkan studi mengenai praktik mahar dalam konteks adat menunjukkan bahwa pemenuhannya dapat dinegosiasikan dan disesuaikan dengan kondisi para pihak (Asni et al., 2025; Pandang et al., 2018). Perbandingan antara sistem *dowry* dan *mahr* juga menunjukkan bahwa mahr memiliki kedudukan kewajiban yang berbeda karena dibentuk oleh norma perkawinan Islam dan tradisi hukum yang melingkupinya (Ekşi & Uddin, 2024). Kajian tentang praktik mahar di Oman juga memperlihatkan bahwa nilai dan pembayaran mahar berada dalam proses sosial yang melibatkan penentuan jumlah dan

bentuk pembayaran (Safar, 2018). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hak dan kewajiban ekonomi dalam mahar beroperasi dalam relasi sosial, bukan terpisah dari konteks yang melahirkannya.

Pembacaan tersebut selaras dengan pandangan yang menempatkan *accounting* sebagai praktik sosial dan institusional. *Accounting* tidak hanya merepresentasikan realitas ekonomi yang telah tersedia, tetapi juga beroperasi dalam lingkungan sosial dan institusional yang turut memberi makna pada praktik ekonomi (Potter, 2005). Perhatian terhadap *accounting* dalam kehidupan sehari-hari juga menunjukkan bahwa nilai, pengukuran, dan praktik ekonomi dapat hadir dalam ruang sosial yang lebih luas daripada organisasi bisnis formal (Jeacle, 2009). Karena itu, hak dan kewajiban mahar dapat dibaca sebagai realitas ekonomi yang memperoleh makna melalui perkawinan, agama, hukum, dan praktik masyarakat.

Dimensi agama semakin memperjelas karakter tersebut. Hubungan antara keyakinan religius dan praktik ekonomi maupun *accounting* menunjukkan bahwa kategori ekonomi tidak sepenuhnya terpisah dari nilai yang hidup dalam masyarakat (Herda et al., 2013). Agama juga dapat berperan dalam membentuk praktik dan budaya *accountability* karena norma religius menyediakan dasar bagi pembentukan tanggung jawab dan hubungan antarpihak (Mutch, 2016). Dalam mahar, dasar kewajiban tidak hanya berasal dari pertukaran ekonomi, tetapi juga dari norma perkawinan Islam yang mengakui hak penerima dan kewajiban pemberi. Temuan ini memperlihatkan bahwa kewajiban ekonomi tidak selalu bermula dari transaksi pasar, tetapi dapat lahir dari relasi sosial yang dilegitimasi oleh agama, hukum, dan budaya.

4.4.2. Nilai dan Pemenuhan Kewajiban Mahar

Hak atas mahar tidak bersifat abstrak karena berhubungan dengan sesuatu yang bernilai. Artikel terpilih menunjukkan mahar dalam bentuk uang, emas, properti, barang, maupun bentuk bernilai lainnya. Besaran dan bentuk tersebut dapat ditentukan, disepakati, atau dipengaruhi oleh praktik sosial dan hukum yang berlaku (Barkah, 2014; Munir, 2022; Safar, 2018). Pembahasan mengenai perangkat ibadah sebagai mahar juga menunjukkan bahwa apa yang dinilai dan diakui sebagai mahar dapat memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan konteks sosial dan praktik perkawinan (Yenti et al., 2020).

Variasi nilai tersebut diikuti oleh variasi dalam mekanisme pemenuhan. Literatur membedakan pembayaran secara langsung, pembayaran di muka, pembayaran sebagian, angsuran, dan bagian yang ditangguhkan (Barkah, 2014; Rapoport, 2000; Safar, 2018). Sumber historis bahkan memperlihatkan pembagian yang jelas antara *advance* dan *deferred sadaq*, yang menunjukkan bahwa dimensi jumlah dan waktu telah menjadi bagian dari praktik pemenuhan mahar pada periode yang jauh lebih awal (Rapoport, 2000). Nilai mahar disimpulkan dari pertanyaan tentang siapa yang berhak, apa yang harus diberikan, serta kapan dan bagaimana kewajiban tersebut harus dipenuhi.

Dari sudut *socio-cultural accounting*, hubungan antara nilai dan pemenuhan ini penting karena memperlihatkan bahwa nilai ekonomi tidak selalu muncul sebagai angka yang berdiri sendiri. Nilai berada dalam relasi

sosial dan institusional yang menentukan makna, kepemilikan, dan kewajiban terhadap nilai tersebut. Posisi ini konsisten dengan pemahaman *accounting* sebagai praktik yang tertanam dalam kehidupan sosial dan institusional (Jeacle, 2009; Potter, 2005). Persoalan mahar tidak hanya berhubungan dengan “berapa nilai” yang diberikan, tetapi juga dengan cara masyarakat menetapkan, mempertahankan, dan memenuhi hak yang melekat pada nilai tersebut.

4.4.3. Penangguhan, Waktu, dan Konstruksi Utang Mahar

Temuan utama menunjukkan bahwa penangguhan tidak identik dengan utang. Istilah *deferred* dan *delayed* menunjukkan pemenuhan pada masa mendatang, sedangkan *unpaid*, *outstanding*, atau *owed* menandakan kewajiban yang belum dipenuhi. Kewajiban baru dikonstruksi sebagai utang apabila sumber secara eksplisit menggunakan istilah *debt* atau *binding debt*. Perbedaan ini konsisten dengan hasil *coding* penelitian.

Perbedaan ini terlihat jelas apabila beberapa artikel dibandingkan. Dalam pembahasan dower di Pakistan, terdapat bagian yang dibayar dan bagian yang tetap *outstanding*, tetapi terminologi tersebut tidak secara otomatis diubah menjadi *debt* (Munir, 2022). Dalam konteks penegakan mahar, *deferred mahar* dapat menjadi *owed* ketika kondisi yang disepakati telah terjadi, seperti perceraian, tanpa harus sejak awal diasumsikan sebagai utang (Raman, 2024). Sebaliknya, penelitian di Banjar secara eksplisit menyatakan bahwa mahar yang belum dipenuhi merupakan *binding debt upon the husband* (Muzainah et al., 2025). Pada praktik *delayed mahar*, ketidakmampuan memenuhi seluruh nilai mahar juga dapat menghasilkan bagian yang menjadi *debt* (Pandang et al., 2018). Konstruksi utang juga ditemukan dalam pembahasan “mahar yang masih terutang” dalam kajian lintas negara Muslim (Barkah, 2014). Bukti-bukti tersebut mendukung keputusan untuk tidak menyamakan seluruh kewajiban tertunda dengan utang.

Pembahasan mengenai mahar di Iran memperlihatkan konstruksi yang lebih eksplisit. *Money-dower* dibahas melalui terminologi *debt*, *creditor*, dan *debtor*, sehingga hubungan antarpihak tidak hanya ditunjukkan melalui nominal yang belum dibayar, tetapi juga melalui posisi pihak yang memiliki hak dan pihak yang masih memiliki kewajiban (Ansari-Pour, 2017). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa status utang berhubungan dengan keberlanjutan hubungan hak-kewajiban, bukan hanya dengan fakta bahwa pembayaran belum dilakukan.

Pembacaan ini beririsan dengan kajian tentang *socio-economy of debt* yang memandang utang melalui dimensi material sekaligus relasional. Utang berada dalam struktur hubungan dan interdependensi sosial sehingga maknanya tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi transaksi moneter (Guérin & Venkatasubramanian, 2022). Kajian mengenai utang dalam relasi sosial juga menunjukkan bahwa kewajiban dapat memiliki keberlangsungan yang panjang dan tetap memengaruhi hubungan antarpihak meskipun waktu telah berlalu (Smith, 2024). Walaupun konteks penelitian tersebut berbeda dari mahar, keduanya memperkuat pembacaan bahwa dapat memiliki keberadaan sosial di luar nilai materialnya.

Dimensi waktu dengan demikian menjadi penting. *Deferred mahr* menci Dengan demikian, dimensi waktu menjadi penting. *Deferred mahr* menciptakan jarak antara terbentuknya kewajiban dan waktu pemenuhan kewajiban. Selama periode tersebut, hak penerima tetap dapat dipertahankan. Studi historis pada komunitas Tatar memperlihatkan keberadaan bagian mahar yang belum dibayarkan, sementara sumber Mesir Islam awal menunjukkan bagian *deferred sadaq* yang tetap didokumentasikan dan dapat dipenuhi pada waktu kemudian (Bakieva, 2010; Rapoport, 2000). Disimpulkan bahwa waktu bukan sekadar informasi tentang tanggal pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari keberlanjutan hak dan kewajiban.

Dimensi waktu dengan demikian menjadi penting karena *deferred mahr* menciptakan jarak antara terbentuknya kewajiban dan waktu pemenuhan kewajiban tersebut. Selama periode tersebut, hak penerima tetap dapat dipertahankan. Studi historis pada komunitas Tatar memperlihatkan keberadaan bagian mahar yang belum dibayarkan, sementara sumber Mesir Islam awal menunjukkan bagian *deferred sadaq* yang tetap didokumentasikan dan dapat dipenuhi pada waktu kemudian (Bakieva, 2010; Rapoport, 2000). Temuan ini menunjukkan bahwa waktu tidak hanya berkaitan dengan kapan pembayaran dilakukan, tetapi juga dengan keberlanjutan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan.

Utang mahar berdasarkan uraian di atas, dapat dibaca sebagai kewajiban relasional bernilai. Pembacaan ini tidak berarti bahwa setiap *deferred mahr* secara otomatis merupakan utang. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan konseptual antara pengaturan waktu pemenuhan (*deferred/delayed*), kewajiban yang pemenuhannya belum selesai (*unpaid/outstanding/owed*), dan kewajiban yang secara eksplisit dikonstruksi sebagai utang (*debt/binding debt*). Ketiga konstruksi tersebut saling berhubungan, tetapi memiliki makna yang berbeda dan tidak selalu muncul secara berurutan dalam setiap praktik mahar.

4.5. PEMBAHASAN RQ2: PEMAKNAN KEWAJIBAN MAHAR MELALUI SEMIOTIKA PEIRCE DAN SOCIO-CULTURAL ACCOUNTING

Hasil RQ2 menunjukkan bahwa kewajiban mahar direpresentasikan melalui tanda yang mencakup hak, kewajiban, nilai, pembayaran, waktu, bagian yang belum dipenuhi, utang, dokumentasi, dan penyelesaian. Semiotika Peirce digunakan sebagai perangkat interpretatif untuk membedakan *sign*, *object*, dan *interpretant*, bukan sebagai tradisi “Peircean accounting”. Pendekatan ini ditempatkan dalam kajian *accounting* yang menekankan interpretasi, representasi, makna, dan konstruksi sosial. (Lukka & Modell, 2017; Parker, 2008).

4.5.1. Tanda dalam Pembentukan dan Keberlanjutan Kewajiban

Tanda pertama yang muncul berkaitan dengan pembentukan posisi hak dan kewajiban. Istilah *financial right*, *exclusive right*, dan *proprietary right*

merepresentasikan posisi penerima, sedangkan *religious obligation* dan *contractual obligation* merepresentasikan pihak yang harus memenuhi kewajiban tersebut. Beberapa artikel menunjukkan kedua posisi tersebut secara cukup eksplisit (Jahangir & Bulut, 2025; Muzainah et al., 2025; Raman, 2024). Dalam relasi Peirce, tanda-tanda tersebut menunjuk pada objek berupa hubungan hak dan kewajiban, sedangkan *interpretant* yang terbentuk menunjukkan bahwa mahar dipahami sebagai tanggung jawab yang mengikat pihak tertentu.

Peran tanda menjadi semakin penting ketika kondisi kewajiban berubah seiring waktu. *Deferred mahr* menandai pemindahan waktu pembayaran; *outstanding* atau *owed* menandai pemenuhan yang belum selesai; sementara *binding debt* atau *debt* merepresentasikan status kewajiban yang lebih tegas (Munir, 2022; Muzainah et al., 2025; Pandang et al., 2018; Raman, 2024). Dengan membaca istilah tersebut sebagai tanda, penelitian dapat mempertahankan perbedaan makna antarkategori dan menghindari penyederhanaan bahwa semua pembayaran yang tertunda merupakan utang.

Pembacaan terhadap tanda dan representasi tersebut dapat ditempatkan dalam tradisi penelitian interpretatif dalam *accounting*. Penelitian interpretatif memberi perhatian pada cara aktor, praktik, dan representasi membentuk pemahaman tentang realitas *accounting* (Dey, 2017; Lukka & Modell, 2017). *Accounting* juga menggunakan berbagai bentuk *inscriptions* yang bukan sekadar mencerminkan realitas secara pasif, tetapi memungkinkan realitas tertentu menjadi dapat dikenali, dipertukarkan, dan diperdebatkan (Busco & Quattrone, 2018). Kajian visual dalam *accounting* juga menunjukkan bagaimana representasi dapat membawa makna budaya dan simbolik yang tidak dapat direduksi menjadi informasi numerik semata (Ahn & Jacobs, 2018). Literatur tersebut tidak digunakan untuk mengklaim bahwa penelitian *accounting* telah lazim menggunakan Peirce, melainkan untuk menunjukkan bahwa perhatian terhadap makna dan representasi memiliki tempat dalam tradisi *interpretif accounting*.

4.5.2. Dokumentasi, Tanda, dan Akuntabilitas Kewajiban Mahar

Salah satu temuan RQ2 yang penting adalah keberadaan *written record* dan *marriage contract*. Sumber historis Mesir Islam awal menunjukkan dokumen yang mencatat pembayaran bagian *advance*, kewajiban atas bagian *deferred*, waktu pembayaran, dan pengakuan atas nilai yang masih *owed* (Rapoport, 2000). Praktik dokumentasi juga ditemukan dalam sumber lain yang memperlihatkan hubungan antara kontrak, jumlah mahar, waktu pembayaran, dan penegakan kewajiban (Bakieva, 2010; Raman, 2024). Bukti ini mendukung pembacaan bahwa kewajiban dapat direpresentasikan dan dipertahankan melalui dokumen sepanjang waktu.

Dokumentasi kewajiban mahar tampak secara khusus pada artikel No. 17 dan No. 30. Artikel No. 17 memuat kontrak perkawinan yang menetapkan *deferred dowry*, sedangkan artikel No. 30 menunjukkan pencatatan bagian *advance*, bagian *deferred*, dan kewajiban yang masih harus dipenuhi (Raman, 2024; Rapoport, 2000). Dalam pembacaan Peirce, dokumentasi tersebut

berfungsi sebagai *sign* yang merujuk pada kewajiban mahar sebagai *object*, dengan *interpretant* bahwa kewajiban dapat tetap dikenali dan ditelusuri meskipun waktu telah berlalu. Fungsi tersebut memiliki titik temu dengan literatur mengenai dokumentasi dan *accountability*. Keberadaan dokumen memungkinkan tindakan, keputusan, dan kewajiban dirujuk kembali sehingga mendukung keterlacakan dan pertanggungjawaban (Meijer, 2003). Representasi informasi juga berada dalam struktur *accountability* yang lebih luas karena informasi memperoleh arti melalui hubungan antara pihak yang memberikan *account* dan pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban (Dillard, 2008). Dalam konteks mahar, relasi tersebut terlihat ketika dokumen bertemu dengan praktik *claim*, *enforcement*, dan *settlement*.

Klaim dan penegakan ditemukan dalam berbagai konteks hukum maupun sosial. Sengketa mengenai *sompa* dapat memasuki penyelesaian pengadilan; *outstanding dower* dapat menjadi objek tuntutan; dan *deferred mahr* dapat ditegakkan ketika syarat jatuh temponya terpenuhi (Asni et al., 2025; Munir, 2022; Raman, 2024). Sumber historis juga memperlihatkan bahwa kewajiban tertulis dapat dirujuk kembali setelah berlalunya waktu (Rapoport, 2000). Dokumentasi tidak secara langsung menyelesaikan kewajiban, tetapi berperan dalam mempertahankan informasi yang memungkinkan hak tetap dikenali, ditelusuri, dan pada kondisi tertentu diajukan untuk pemenuhan.

Dalam perspektif *socio-cultural accounting*, pencatatan nilai, pembayaran, dan bagian *outstanding* menjaga visibilitas serta jejak hak dan kewajiban. Relevansinya bukan sebagai sistem *accounting* formal, melainkan sebagai representasi nilai, pemeliharaan informasi, dan pertanggungjawaban atas pemenuhannya.

4.5.3. Membaca Utang Mahar melalui Socio-Cultural Accounting

Penggabungan hasil RQ1 dan pembacaan semiotik RQ2 menunjukkan bahwa kewajiban mahar tertanam dalam hubungan perkawinan dan dipengaruhi oleh agama, hukum, budaya, dan praktik sosial. Posisi ini sejalan dengan pandangan bahwa *accounting* merupakan praktik sosial dan institusional (Potter, 2005) serta dapat dijumpai dalam praktik keseharian yang membentuk dan dibentuk oleh konteks budaya (Jeacle, 2009). Relevansi mahar terhadap *accounting* tidak bergantung pada keberadaan laporan keuangan atau sistem *double-entry*, melainkan pada bagaimana nilai, hak, kewajiban, waktu, bukti, dan pertanggungjawaban dibentuk dan dipertahankan.

Dimensi religius turut membentuk daya ikat mahar melalui norma Islam yang melegitimasi hak dan kewajiban. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai hubungan nilai keagamaan dengan praktik ekonomi dan *accounting* (Herda et al., 2013; Joannidès de Lautour, 2016), serta peran agama dalam membentuk budaya *accountability* (Mutch, 2016). Temuan ini memperluas pemahaman tersebut ke praktik perkawinan, ketika daya ikat ekonomi terbentuk melalui relasi religius dan sosial.

Istilah *deferred*, *outstanding*, *owed*, dan *debt* merepresentasikan kondisi kewajiban mahar yang berbeda dan tidak selalu menunjukkan liabilitas secara

formal. Semiotika Peirce menjelaskan representasi tersebut melalui relasi *sign-object-interpretant*, sedangkan *socio-cultural accounting* menafsirkan maknanya dalam konteks sosial, budaya, religius, dan institusional.

Penelitian ini mengusulkan utang mahar sebagai *value-bearing relational obligation*, yaitu kewajiban bernilai yang lahir dari relasi sosial, melibatkan pihak yang berhak dan berkewajiban, bertahan sepanjang waktu, serta dapat didokumentasikan, diklaim, dan diselesaikan. Konsep ini tidak bersifat universal karena mahar tertunda hanya dipahami sebagai utang apabila didukung oleh sumber.

5. SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa mahar merupakan relasi hak dan kewajiban bernilai yang dapat dibayar langsung atau ditangguhkan. Namun, *deferred mahr* tidak otomatis menjadi utang. Konstruksi utang hanya muncul ketika literatur menggunakan istilah *debt*, *binding debt*, atau *creditor-debtor*. Melalui semiotika Peirce dan perspektif *socio-cultural accounting*, penelitian ini mengusulkan utang mahar sebagai *value-bearing relational obligation*, yaitu kewajiban bernilai yang lahir dari relasi sosial dan tetap mengikat sepanjang waktu.

Temuan ini memperluas pemahaman *accounting* bahwa kewajiban ekonomi dapat muncul dari institusi sosial, bukan hanya dari transaksi formal. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan artikel Scopus dan keragaman disiplin serta konteks geografis, sehingga hasilnya tidak bersifat universal. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sumber literatur, membandingkan konteks budaya dan hukum, serta menguji konsep tersebut secara empiris pada mahar dan kewajiban ekonomi berbasis relasi sosial lainnya.

6. PERNYATAAN ETIS

Penulis menyatakan bahwa *artificial intelligence* (AI) digunakan secara terbatas, etis, dan bertanggung jawab dalam penyusunan artikel ini. ai hanya digunakan untuk membantu penyuntingan bahasa, meliputi perbaikan tata bahasa, struktur kalimat, kejelasan, dan keterbacaan naskah. ai tidak digunakan untuk merumuskan ide penelitian, mengumpulkan atau menganalisis data, menafsirkan hasil, menyusun kesimpulan, maupun menentukan referensi. Seluruh substansi ilmiah, keakuratan informasi, analisis, interpretasi, dan tanggung jawab akademik atas artikel ini sepenuhnya berada di tangan penulis.

7. DAFTAR PUSTAKA

Ahn, P., & Jacobs, K. (2018). Using photographs in interpreting cultural and

- symbolic meaning: A reflection on photographs of the Korean Association for Government Accounting. *Accounting Forum*, 42(1), 142–152. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2017.08.002>
- Ansari-Pour, M. A. (2017). Indexation of Mahr (Dower): A precursor of the law of inflation in Iran. *Arab Law Quarterly*, 31(2), 187–202. <https://doi.org/10.1163/15730255-12341338>
- Asni, A., Tarmizi, T., Arisyanti, A., & Kurniati, K. (2025). Sompa and Doi Menre in Bugis Bone marriage and its settlement in the Religious Court from the perspective of Maslahah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(2), 1012–1033. <https://doi.org/10.22373/r4qw6859>
- Azahari, R., & Ali, H. M. (2015). Mahr as a form of economic security: A preliminary study. *Arab Law Quarterly*, 29(3), 296–305. <https://doi.org/10.1163/15730255-12341300>
- Bakieva, G. T. (2010). Marriages among the Tobol-Irtysh Tatars in the late 18th–early 20th centuries. *Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia*, 38(1), 83–90. <https://doi.org/10.1016/j.aeae.2010.05.011>
- Barkah, Q. (2014). Kedudukan dan jumlah mahar di negara Muslim. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 279–286. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1286>
- Basri, H., & Siti-Nabiha, A. K. (2016). Accounting system and accountability practices in an Islamic setting: A grounded theory perspective. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 24(S), 59–78.
- Busco, C., & Quattrone, P. (2018). Performing business and social innovation through accounting inscriptions: An introduction. *Accounting, Organizations and Society*, 67, 15–19. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.03.002>
- Cordery, C. J. (2015). Accounting history and religion: A review of studies and a research agenda. *Accounting History*, 20(4), 430–463. <https://doi.org/10.1177/1032373215610590>
- Dey, C. (2017). Ethnography, ethnomethodology and anthropology studies in accounting. In *The Routledge Companion to Qualitative Accounting Research Methods* (pp. 147–162). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315674797-9>
- Dillard, J. (2008). Responding to expanding accountability regimes by representing organizational context. *International Journal of Accounting Information Systems*, 9(1), 21–42. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2008.01.001>
- Dwertmann, D. J. G., & van Knippenberg, D. (2021). Capturing the state of the science to change the state of the science: A categorization approach to integrative reviews. *Journal of Organizational Behavior*, 42(2), 104–117. <https://doi.org/10.1002/job.2474>

- Ekşi, A., & Uddin, E. (2024). Comparing dowry system and Mahr: Cultural practices versus Ottoman law in Turkish matrimonial traditions. *Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies*, 46(2), 17–28. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2024-4602-02>
- Elsbach, K. D., & van Knippenberg, D. (2020). Creating high-impact literature reviews: An argument for ‘integrative reviews.’ *Journal of Management Studies*, 57(6), 1277–1289. <https://doi.org/10.1111/joms.12581>
- Fournier, P. (2010). Flirting with God in Western secular courts: Mahr in the West. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 24(1), 67–94. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebp011>
- Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510. <https://doi.org/10.1086/228311>
- Guérin, I., & Venkatasubramanian, G. (2022). The socio-economy of debt: Revisiting debt bondage in times of financialization. *Geoforum*, 137, 174–184. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.05.020>
- Herda, D. N., Reed, S. A., & Bowlin, W. F. (2013). The relationship between religious beliefs and the accounting and economic practices of a society: Evidence from the dead sea scrolls. *Accounting Historians Journal*, 40(2), 115–144. <https://doi.org/10.2308/0148-4184.40.2.115>
- Jahangir, R., & Bulut, M. (2025). Rejuvenating the practice of Mahr for Muslim women’s financial empowerment through an interest-free savings-based finance model. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(3), 506–532. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2022-0298>
- Jeacle, I. (2009). Accounting and everyday life: Towards a cultural context for accounting research. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 6(3), 120–136. <https://doi.org/10.1108/11766090910973894>
- Joannidès de Lautour, V. (2016). *Accounting, Capitalism and the Revealed Religions: A Study of Christianity, Judaism and Islam*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-32333-6>
- Lukka, K., & Modell, S. (2017). Interpretive research in accounting: Past, present and future. In Z. Hoque, L. D. Parker, M. A. Covalleski, & K. Haynes (Eds.), *The Routledge Companion to Qualitative Accounting Research Methods* (pp. 37–55). Routledge.
- Mauludimah, L., Ramadhanikar, N. S., & Baehaqi, A. (2023). Handling externalities in environmental accounting at XYZ Hospital: A perspective of amanah metaphors. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(2), 169–187. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i1.483>
- Meijer, A. J. (2003). Trust this document! ICTs, authentic records and

- accountability. *Archival Science*, 3(3), 275–290.
<https://doi.org/10.1007/s10502-004-1287-z>
- Munir, M. (2022). Financial rights of woman on the dissolution of her marital relationship and death of her husband in Islamic law and Pakistani legal system. *Hamdard Islamicus*, 45(2), 27–57.
<https://doi.org/10.57144/hi.v45i2.272>
- Mutch, A. (2016). Religion and accounting texts in eighteenth century Scotland: Organizational practices and a culture of accountability. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(6), 926–946.
<https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2014-1753>
- Muzainah, G., Hafidzi, A., & Al-Amruzi, M. F. (2025). Integrating Religious and Customary Financial Obligations in Banjarese Marriages: Muhammad Arsyad al-Banjari's Islamic Legal Thought on Balanja al-Nikāḥ. *Journal of Islamic Law*, 6(2), 358–376.
<https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.4888>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pandang, I., Rahman, A., Halimang, S., & Mahrudin. (2018). Delayed Mahar: The perspective of Islamic and customary law. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175, 12140.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012140>
- Parker, L. D. (2008). Interpreting interpretive accounting research. *Critical Perspectives on Accounting*, 19(6), 909–914.
<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.03.013>
- Peirce, C. S. (1931). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce* (C. Hartshorne, P. Weiss, & A. W. Burks (eds.); Vols. 1–8). Harvard University Press.
- Peirce, C. S. (1977). *Semiotic and Significs: The Correspondence between Charles S. Peirce and Victoria Lady Welby* (C. S. Hardwick & J. Cook (eds.)). Indiana University Press.
- Peirce, C. S. (1992). The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. In N. Houser & C. J. W. Kloesel (Eds.), *The Essential Peirce* (Vol. 1). Indiana University Press.
- Peirce, C. S. (1998). The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. In P. E. Project (Ed.), *The Essential Peirce* (Vol. 2). Indiana University Press.

- Potter, B. N. (2005). Accounting as a social and institutional practice: Perspectives to enrich our understanding of accounting change. *Abacus*, 41(3), 265–289. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2005.00182.x>
- Rachmadani, F. (2023). *Mengungkap praktik akuntansi dalam penetapan nilai mahar (boka) pada pernikahan adat Buton di Kota Baubau*. Universitas Hasanuddin.
- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep akuntansi syariah pada budaya mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 82–101. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005>
- Raman, D. (2024). Enforceability of mahr under a shari‘a law-based contract in New Zealand: A comparison with United Kingdom, Australia, and Canada. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 38(1), ebae020. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebae020>
- Rapoport, Y. (2000). Matrimonial gifts in early Islamic Egypt. *Islamic Law and Society*, 7(1), 1–36. <https://doi.org/10.1163/156851900507553>
- Safar, J. (2018). Explaining marriage payments: Mahr among Omanis. *Hawwa*, 16(1–3), 90–143. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341338>
- Shoimah, L., Afifudin, A., & Sari, A. F. K. (2022). Konsep akuntansi syariah dengan nilai-nilai mahar (Studi empiris pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong). *E-JRA: Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(1).
- Showkat, A. (2023). The principle and practice of Mahr in Muslim marriages. *Feminist Theology*, 31(2), 197–209. <https://doi.org/10.1177/09667350221134992>
- Smith, D. J. (2024). ‘A debt never dies’: Navigating trust and betrayal in southeastern Nigeria. *Ethnography*, 25(4), 486–504. <https://doi.org/10.1177/14661381241263850>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Torraco, R. J. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428. <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>
- Yenti, E., Busyro, B., Ismail, I., Rosman, E., & Wadi, F. (2020). A set of prayer outfits as a Mahar? Discrimination against women in the ‘Urf reality of the Archipelago’s fiqh. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 20(1), 17–30. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i1.567>
- Zhang, X., & Sheng, J. (2017). A Peircean semiotic interpretation of a social sign. *Annals of Tourism Research*, 64, 163–173. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.04.002>